



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

**TANGGUNG JAWAB DIREKSI TERHADAP TINDAK
PIDANA YANG BERTUJUAN MEMPERKAYA
KORPORASI LAIN
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor
41/PK/PID.SUS/2015)**

TESIS

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum
Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana
Konsentrasi Hukum : Hukum Bisnis**

Oleh:

**Raka Gani Pissani
Nomor Induk Mahasiswa 1802190812**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
2021**



HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya ilmiah saya berupa tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, Magister) baik di Universitas Kristen Indonesia maupun di perguruan tinggi lain;
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing;
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jakarta, 25 Oktober 2021

Yang membuat pernyataan,



Raka Gani Pissani

NIM : 1802190812

HALAMAN PENGESAHAN

TANGGUNG JAWAB DIREKSI TERHADAP TINDAK PIDANA YANG
BERTUJUAN MEMPERKAYA KORPORASI LAIN
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 41/PK/PID.SUS/2015)



Oleh:


Raka Gani Pissani
Nomor Induk Mahasiswa 1802190812

TESIS

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum
Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana
Konsentrasi Hukum : Hukum Bisnis

Jakarta, 25 Oktober 2021


Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA.
Pembimbing I


Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.
Pembimbing II

Mengetahui,

Program Studi Hukum Program Magister
Ketua,




Dr. Gindo E.L. Tobing, S.H., M.H.

Direktur Program Pascasarjana




Dr. Bintang Simbolon, M.Si

HALAMAN PENGESAHAN

TANGGUNG JAWAB DIREKSI TERHADAP TINDAK PIDANA YANG
BERTUJUAN MEMPERKAYA KORPORASI LAIN
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 41/PK/PID.SUS/2015)



Oleh:

Raka Gani Pissani

Nomor Induk Mahasiswa 1802190812


TESIS


Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum
Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana
Konsentrasi Hukum : Hukum Bisnis

Telah diuji di Jakarta, pada tanggal 29 Oktober 2021

Ketua Sidang,


Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H, MBA.
Penguji


Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.
Penguji


Dr. Gindo E.L. Tobing, S.H., M.H.
Penguji



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai mahasiswa Universitas Kristen Indonesia, yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Rakã Gani Pissani

NIM : 1802190812

Dengan pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Kristen Indonesia, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah yang saya buat yang berjudul : “**TANGGUNG JAWAB DIREKSI TERHADAP TINDAK PIDANA YANG BERTUJUAN MEMPERKAYA KORPORASI LAIN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 41/PK/PID.SUS/2015)**”

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Kristen Indonesia berhak menyimpan, mengalih-mediakan formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), mendistribusikan, menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu izin dari saya selama tetap mencantumkan saya sebagai penulisnya / pencipta.

Saya bersedia menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Universitas Kristen Indonesia, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 25 Oktober 2021

Yang menyatakan,



Raka Gani Pissani



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Alloh Subhanahu Wa Ta'ala atas berkat rahmat dan bimbinganNya pada akhirnya Penulis dapat menyelesaikan juga penulisan tesis ini. Tesis ini mengkaji mengenai **TANGGUNG JAWAB DIREKSI TERHADAP TINDAK PIDANA YANG BERTUJUAN MEMPERKAYA KORPORASI LAIN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 41/PK/PID.SUS/2015)**. Tidak lupa dalam penulisan tesis ini, Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terpelajar Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H, MBA, selaku Pembimbing sekaligus Rektor Universitas Kristen Indonesia dan Ibu Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H., yang menjadi Pembimbing Penulis tanpa mengenal lelah sampai selesainya penulisan tesis ini.

Tidak lupa juga Penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Dr. Gindo E.L. Tobing, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum, Program Magister, Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia;
2. Seluruh Dosen Program Studi Hukum, Program Magister, Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia;
3. Seluruh rekan-rekan angkatan Penulis;
4. Keluarga yang tercinta, yang dengan penuh perhatian serta cinta yang tulus terus-menerus mendoakan Penulis dalam penyelesaian penulisan tesis ini;
5. Semua pihak yang tak dapat Penulis sebutkan satu persatu dalam tesis ini.

Akhir kata, tak ada gading yang tak retak, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi civitas akademika Universitas Kristen Indonesia pada umumnya dan Program Studi Hukum, Program Magister, Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, pada khususnya.

Jakarta, 25 Oktober 2021

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Permasalahan	1
1.2. Perumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.5. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konsep	10
1.6. Metode Penelitian	23
1.7. Sistematika Tesis	26
BAB II TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN DIREKSI	
2.1. Negara Hukum	27
2.2. Perseroan Terbatas	38
2.3. Pertanggungjawaban Hukum	59
2.4. Tindak Pidana Korupsi	68
2.5. Perlindungan Hukum	82

BAB III KASUS POSISI PERKARA HOTASI D.P NABABAN

3.1. Perkara Hotasi D.P Nababan Selaku Direktur Utama PT.
Merpati Nusantara (Persero) 92

3.2. Putusan Perkara Hotasi D.P Nababan 104

**BAB IV TANGGUNG JAWAB DAN PERLINDUNGAN HUKUM
DIREKSI TERHADAP TINDAK PIDANA YANG
BERTUJUAN MEMPERKAYA KORPORASI LAIN**

4.1. Tanggung Jawab Direksi Terhadap Tindak Pidana Yang
Bertujuan Memperkaya Korporasi Lain 109

4.2. Perlindungan Hukum Terhadap Direksi BUMN Dalam
Pengambilan Kebijakan Bisnis Sehingga Dapat Terhindar Dari
Ancaman Pidana Korupsi 122

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan..... 144

5.2. Saran 145

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Raka Gani Pissani, Nomor Induk Mahasiswa 1802190812, *Tanggung Jawab Direksi Terhadap Tindak Pidana Yang Bertujuan Memperkaya Korporasi Lain (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 41/PK/PID.SUS/2015)*, Program Studi Hukum, Program Magister, Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia.

Latar Belakang: Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perseroan Terbatas ketika mengalami kerugian dalam jumlah sangat besar akibat keputusan Direksi, berpotensi dari perkara perdata menjadi perkara pidana. **Permasalahan:** (1) Bagaimana tanggung jawab direksi terhadap tindak pidana yang bertujuan memperkaya korporasi lain? (2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap direksi BUMN dalam pengambilan kebijakan bisnis sehingga dapat terhindar dari ancaman pidana korupsi? **Metode Penelitian:** Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. **Pembahasan:** Tanggung jawab direksi terhadap tindak pidana yang bertujuan memperkaya korporasi lain adalah secara pidana dapat dijerat dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait dengan merugikan keuangan negara. Pertanggungjawaban secara perdata, maka direksi yang terbukti melakukan kebijakan yang bertujuan memperkaya korporasi lain, bertanggungjawab mengganti kerugian perseroan. Namun demikian dalam penelitian ini, oleh karena Hotasi Nababan selaku Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airline mengambil kebijakan dengan prinsip itikad baik, maka seharusnya lepas dari segala bentuk pertanggungjawaban. Perlindungan hukum terhadap direksi BUMN dalam pengambilan kebijakan bisnis sehingga dapat terhindar dari ancaman pidana korupsi terbagi menjadi 2 (dua), yaitu secara preventif, direksi BUMN yang akan mengambil kebijakan strategis, maka perlu untuk menetapkan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) yang disetujui oleh RUPS. Perlindungan hukum secara represif adalah penggunaan prinsip *business judgement rule* yang dimaksudkan untuk melindungi direksi dan karyawan, yang beritikad baik, dari pertanggungjawaban secara pribadi akibat keputusan bisnis yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Direksi, Korporasi.

ABSTRACT

Raka Gani Pissani, Student ID Number 1802190812, Responsibilities of Directors for Crimes Aiming to Enrich Other Corporations (Case Study of Supreme Court Decision Number 41/PK/PID.SUS/2015), Law Study Program, Master Program, Postgraduate Program, Christian University of Indonesia

Background: *A State-Owned Enterprise in the form of a Limited Liability Company when it suffers a very large loss due to the decision of the Board of Directors, has the potential to turn a civil case into a criminal case. **The problems:** (1) What is the responsibility of the board of directors for criminal acts aimed at enriching other corporations? (2) How is the legal protection for BUMN directors in making business policies so that they can avoid the threat of corruption? **Research Methods:** This research method is normative juridical. **Discussion:** The responsibility of the board of directors for criminal acts aimed at enriching other corporations is criminally liable to be charged with Article 3 of Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes related to harming state finances. In civil liability, the directors who are proven to have carried out policies aimed at enriching other corporations are responsible for compensating the company's losses. However, in this study, because Hotasi Nababan as the President Director of PT Merpati Nusantara Airline took a policy with the principle of good faith, it should be free from all forms of accountability. Legal protection for BUMN directors in making business policies so as to avoid the threat of criminal corruption is divided into 2 (two), namely preventively, BUMN directors who will take strategic policies, it is necessary to establish a Corporate Budget Work Plan (RKAP) which is approved by the GMS . Repressive legal protection is the use of the principle of business judgment rule which is intended to protect directors and employees, who have good intentions, from personal liability due to business decisions that cause losses to the company.*

Keywords : *Responsibilities, Directors, Corporation*